

**INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DALAM PERDA *SYARÎ'AH* DI
INDONESIA**

**(Studi Kebijakan Publik Terhadap Pencapaian Indeks Pembangunan
Manusia Amartya Sen dalam Perda *Syarî'ah* di Kota Bandung, Tasikmalaya,
dan Bulukumba)**



Oleh: Ahmad Muhlasul Wr.

NIM: 1520010047

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Master of Art
(M.A.)

Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

YOGYAKARTA

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Mulasul Wr., S.H.I.

NIM : 1520010047

Program : Magister (S2)

Program Study : Interdisciplinary Islamic Studies (IIS)

Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik (IPKP)

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumbernya.

Yogyakarta, 25 Oktober 2017

Saya yang menyatakan,



Ahmad Muhlasul Wr., S.H.I
NIM: 1520010047

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Mulasul Wr., S.H.I.

NIM : 1520010047

Program : Magister (S2)

Program Study : Interdisciplinary Islamic Studies (IIS)

Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik (IPKP)

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Oktober 2017

Saya yang menyatakan,



Ahmad Muhlasul Wr., S.H.I
NIM: 1520010047



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : Indeks Pembangunan Manusia Dalam Pelaksanaan Perda
Syari'ah di Indonesia (Studi Kebijakan Publik Terhadap
Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Amarty Sen
dalam Perda *Syari'ah* di Kota Bogor, Tasikmalya, dan
Bulukumba)

Nama : Ahmad Muhlasul Wr, S.H.I
NIM : 1520010047
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik
Tanggal Ujian : 22 November 2017

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Master of Arts
(M.A)

Yogyakarta, 06 Desember 2017

Direktur,



Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.

NIP 19711207 199503 1 002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

Tesis Berjudul: Indeks Pembangunan Manusia Dalam Pelaksanaan Perda *Syar'i'ah* di Indonesia (Studi Kebijakan Publik Terhadap Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Amartya Sen dalam Perda *Syar'i'ah* di Kota Bogor, Tasikmalya, dan Bulukumba)

Nama : Ahmad Muhlasul Wr., S.H.I

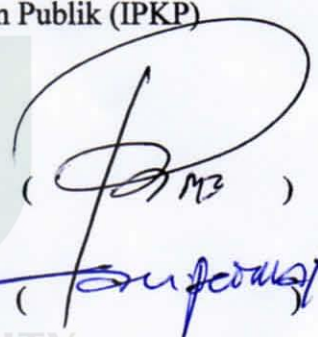
NIM : 1520010047

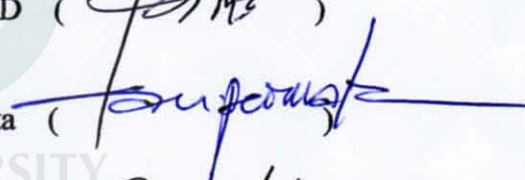
Program : Magister (S2)

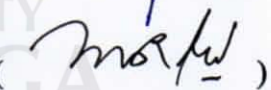
Program Study : Interdisciplinary Islamic Studies (IIS)

Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik (IPKP)

Telah disetujui tim penguji ujian munaqasyah.

Ketua/Penguji : Ro'fah, S.Ag., BSW., MA., Ph.D ()

Pembimbing/Penguji : Dr. Phil. Ahmad Norma Permata ()

Penguji : Dr. Munawar Ahmad, S.S., M.Si. ()

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 22 November 2017

Waktu : 08.30-09.30 WIB

Hasil/Nilai : 90/A-

Predikat : Memuaskan/ Sangat Memuaskan/ Cumlaude*

*Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**Indeks Pembangunan Manusia Dalam Pelaksanaan Perda Syari'ah di
Indonesia (Studi Kebijakan Publik Terhadap Pencapaian Indeks
Pembangunan Manusia Amarty Sen dalam Perda Syari'ah di Kota Bogor,
Tasikmalya, dan Bulukumba)**

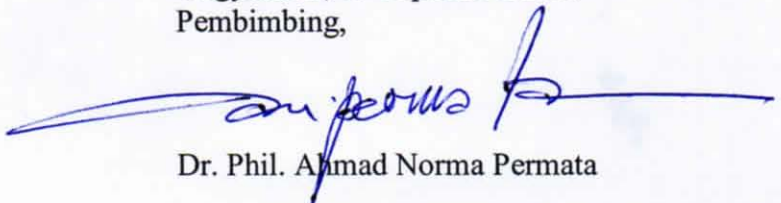
Yang ditulis oleh:

Nama: Ahmad Muhlasul Wr., S.H.I
NIM: 1520010047
Program : Magister (S2)
Program Study : Interdisciplinary Islamic Studies (IIS)
Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik (IPKP)

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Master of Art (M.A.)

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 15 September 2017
Pembimbing,



Dr. Phil. Ahmad Norma Permata

ABSTRAK

Pergeseran arah pembangunan dunia dari GDP/GNP (*Gross Domestic Product/Gross National Product*) ke HDI (*Human Development Index*) yang dimulai sejak era 90-an, menuntut dunia untuk menggeser Arah pembangunan dari ekonomi sentris ke human sentris. Sebagai produk kebijakan publik, bagaimana gambaran konsep pembangunan manusia dalam Perda Syari'ah bila dikaitkan dengan konsep Pembangunan global? Bagaimana pula jawaban dari pertanyaan tersebut dilihat dari kacamata disiplin kebijakan publik? Pertanyaan tersebut yang ingin penulis telusuri lewat penelitian dalam tesis ini.

Pisau pembedah dalam penelitian ini berupa teori Pembangunan Manusia, dan disiplin Ilmu Kebijakan Publik, dengan metode deskriptif analitis terhadap terhadap data-data sekunder (baca: jenis penelitian berupa *library research*). Penelitian ini menggunakan instrumen penelitan (*cross chek* validasi dan releabilitas triangulasi data) yang berasal dari teori Pembangunan Manusia dan Kebijakan Publik terhadap tema-tema dan data-data yang diangkat dan temuan-temuan yang didapat.

Dari banyak temuan yang didapat, dapat disimpulkan bahwa Perda Syari'ah menggambarkan konsep Pembangunan Manusia versi domestik, dengan indikator etik dan tehnis yang khas; yang mencerminkan model kebijakan yang mencirikan model kebijakan kontinental. Bersifat linear dengan konsep Pembangunan Manusia dalam arahnya (*primary ends*), namun inkoheren di beberapa sisi yang berkenaan dengan cara dan prinsipnya (*principal means*).

MOTTO

Faidza Faraghta Fanshabb, wa Ila Rabbika Farghab

(QS: al Insyirah: 4-5)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini aku persembahkan untuk Ibunda, Ayahanda, Istri, dan Anak-anakku, serta keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Hikmah Sumbermanis Madura.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘ —	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اَوَّ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hau*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ ... اِ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā	a dan garis di atas

يَ	<i>kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*..

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمْ : *nu‘ima*

عَوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّءٌ : *syai'un*

أَمِرتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qurʿān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-ʿIbārāt bi ʿumūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِئِنَّالله *dīnullāh* بِالله *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُفِيَرَحْمَةِالله *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal

dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. karena penulisan tesis berjudul: *Dimensi Pembangunan Manusia Dalam Perda Syari'ah (Analisa Kebijakan Publik Terhadap Perda Syari'ah di Indonesia)* selesai pada waktunya. Atas ridha dan kehendakNya lah sehingga penulisan tesis ini berjalan dengan lancar.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan civitas akademika UIN Sunan Kalijaga, yaitu: Bapak Prof. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga; Prof. Noorhaidi Hasan, MA., M. Phil., Ph.D., selaku direktur Pascasarjana; Ibu Ro'fah, BSW., Ph.D., dan Dr. Roma Ulinnuha, M. Hum., sebagai ketua dan sekretaris Prodi *Interdisciplinary Islamic Studies*. Terima kasih kepada seluruh dosen Pascasarjana yang telah memberikan curahan ilmu pengetahuan yang begitu bermanfaat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

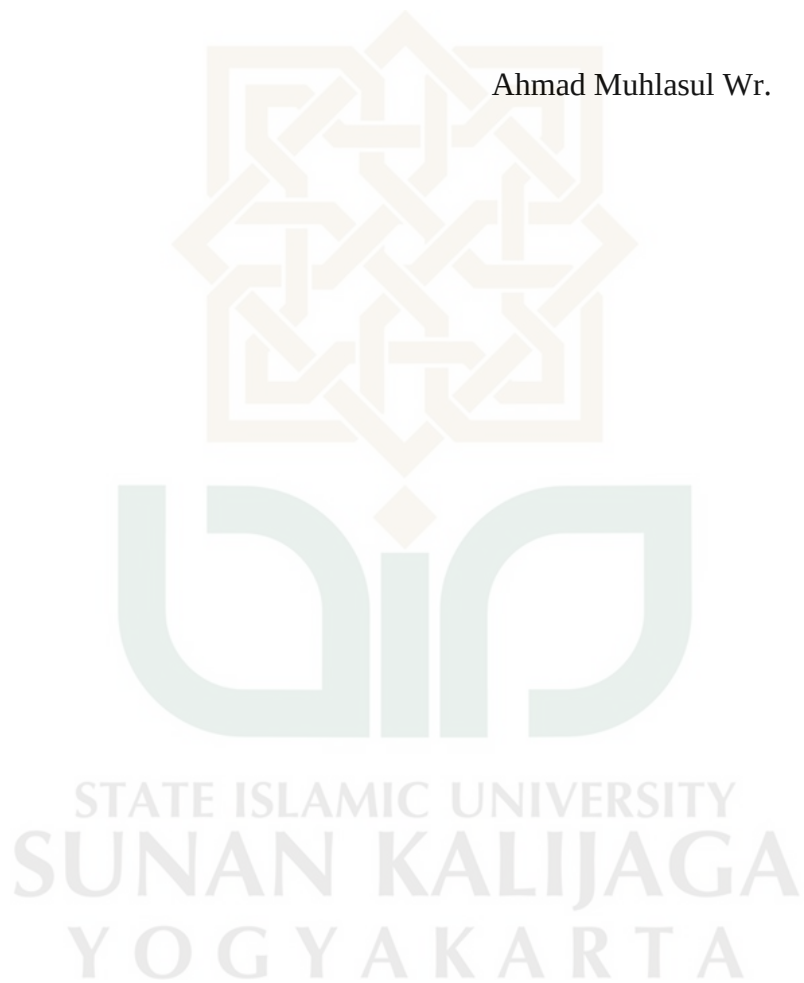
Terima kasih sebesar-besarnya kepada **Dr. Phil. Ahmad Norma Permata, MA.**, selaku pembimbing tesis ini. Terima kasih juga kepada Bapak **Akbar Susanto, MA. Ph.D.** yang telah memberikan pencerahan dalam hal teori-teori pembangunan dan ekonomi; Bapak **Najib Kaelani, S. Fil. MA. Ph.D.** yang telah memberikan banyak wawasan dalam hal diskursus keilmuan Islam global; Bapak Dr. **Hakimul Ikhwan, MA.** yang telah memberikan banyak ide tentang kritik pembangunan; Bapak **Ahmad Uzer, Ph.D.** yang telah mengenalkan ide-ide Amartya Sen dan berbagai teori pembangunan alternatif; dan Bapak Dr. **Alim Riswanto, M.Ag.** dengan diskursus keilmuan filsafatnya. Bapak-bapak sekalian

merupakan “guru” bagi penulis di dunia dan di akhirat. Sembah kasih juga kepada Ayahanda dan Ibunda, istri dan anak-anak, serta Keluarga Besar Pond. Pest. Nurul Hikmah Sumbermanis, Madura.

Yogyakarta, 15 September 2017

Penulis,

Ahmad Muhlasul Wr.



DAFTAR ISI

I.	BAB I (PENDAHULUAN)	1
A.	Latar Belakang	1
1.	Perda Syari'ah	6
2.	Diskursus Konsep Pembangunan Manusia Global	11
3.	Analisa Kebijakan Publik Terhadap Perda Syari'ah Terkait Konsep Pembangunan Manusia	11
B.	Rumusan Masalah	13
C.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
1.	Tujuan Penelitian	15
2.	Kegunaan Penelitian	15
D.	Kajian Pustaka	16
E.	Kerangka Teoritis	21
F.	Metode Penelitian	26
1.	Jenis Penelitian	26
2.	Pendekatan Penelitian	27
3.	Obyek dan Subyek Penelitian	31
4.	Tehnik Pengumpulan Data	31
5.	Tehnik Analisa Data	32
G.	Sistematika Pembahasan	33
II.	BAB II (ANATOMI KONTENT PERDA SYARI'AH)	35
A.	Definisi Perda Syari'ah	34
B.	Klasifikasi Perda Syari'ah	36

1. Kategori Umum	36
2. Kategori Khusus	38
C. Sebaran Perda Syari'ah	51
D. Modelling Kontent Perda Syari'ah	56
III. BAB III (GENEOLOGI PERDA SYARI'AH: ELABORASI KONTEKS PERDA SYARI'AH DI INDONESIA)	59
A. Elaborasi Historis Kemunculan Perda Syari'ah	55
1. Kejatuhan Orde Baru	56
2. Kemunculan Gerakan Islam dan Kelas Menengah	58
3. Reformasi Konstitusi dan Undang-Undang (Otonomi Daerah)	60
B. Latar Ideologis	62
1. Syari'ah Islam: Tinjauan Normatif Terhadap Hubungan Antara Agama dan Negara	62
2. Geneologi Ideologi Kekuatan Politik Islam di Indonesia	66
C. Perda Syari'ah dan Konstitusi Negara	69
1. Hukum Islam dan Nation-State: Agama dan Ruang Publik	69
2. Kontestasi Perda Syari'ah dan Konstitusi Negara	77
D. Latar Politik	86
1. Organisasi Massa Islam	86
2. Antara Organisasi, Ideologi, dan Kekuasaan	89
E. Perda Syari'ah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	95
IV. BAB IV (DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA DALAM PERDA SYARI'AH DI INDONESIA)	104

A. Tentang Pembangunan dan Teorinya	104
1. Evolusi Teori Pembangunan	104
B. Pembangunan Manusia dalam Kerangka Teori Kapabilitas Amartya Sen dan UNDP	112
1. Teori Kapabilitas Amartya Sen	112
2. Konsep UNDP Tentang IPM	121
C. Dimensi Pembangunan Manusia dalam Perda Syari'ah: Analisa Terhadap Proses dan Impelementasi Perda Syari'ah	124
1. Proses Politik dan Birokrasi	125
2. Perda Syari'ah (Kontent dan Isu di Dalamnya): Studi Kasus Perda Diniyah Takmiliah di Kota Bandung, Perda ZIS di Bulukumba, dan Perda HIV/AIDS di Tasikmalaya	127
3. Program, Impelementasi Kerja, dan Capaian	128
4. Analisa Teori Kapabilitas Amartya Sen Terhadap Program, Impelementasi Kerja, dan Capaian Perda Syari'ah	135
5. Implikasi Perda Syari'ah terhadap HDI	138
D. Kritik	140
V. PENUTUP	143

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1:	Alur analisa terhadap konten Perda Syari'ah.	27
Tabel 1.2:	Jenis Penelitian, Model, Basic Theory, dan Rujukan	29
Tabel 1.3:	Pendekatan, Metode, dan Rujukan... ..	30
Tabel 1.4:	Instrumen Penelitian.....	31
Tabel 2.1:	Jumlah Perda Syari'ah Bertemakan Kesalehan Menurut Propinsi	43
Tabel 2.2:	Jumlah Perda Syari'ah Bertemakan Pendidikan.....	45
Tabel 2.3:	Jumlah Perda Syari'ah Bertemakan Ekonomi Menurut Provinsi...	47
Tabel 2.4:	Jumlah Keseluruhan Perda Syari'ah Berdasarkan Provinsi.....	49
Tabel 2.5:	Perda (dan Perkada) Syari'ah Berdasarkan Kronologi Penyebarannya.....	52
Tabel 2.6:	Jumlah Perda (dan Peraturan Daerah lainnya berupa Perkada) Syari'ah berdasarkan tahun.....	55
Tabel 2.7:	Modelling Arah Kebijakan Perda Syari'ah Berdasarkan Kontent..	58
Tabel 3.1:	Peta Geneologi Kekuatan Ideologis-Politik Islam dan Transformasinya di Indonesia.....	72

Tabel 3.2:	Gambaran Visi Tipologi Ideologi Politik Islam dalam Konteks Relasi Agama-Negara.....	75
Tabel 3.3:	Model Ideologis Gerakan Politik Penegakan Syari'ah di Indonesia.....	81
Tabel 3.4:	Fase-Fase dan Bentuk Penerapan Syari'ah Islam di Indonesia....	88
Tabel 3.5:	Geneologi Manhajul Fikr dan Keterkaitannya Dengan Kelahiran Perda Syari'ah	103
Tabel 4.1:	Teori-Teori Pembangunan dan Evolusinya.....	110
Tabel 4.2:	Konsep Etik dan Indikator Tehnik Pembangunan Manusia.....	124

DAFTAR GAMBAR

Gambar: 1.1: Modelling Penelitian Dimensi Pembangunan Manusia Dalam Perda Syari'ah Sebagai Kebijakan Publik.....	16
Gambar 1.2: Studi Kebijakan Publik dalam pencapaian IPM model Jenkins dan Amartya Sen	26
Gambar 2.1: Posisi Definitif Perda Syari'ah yang Bersifat Umum.....	39
Gambar 2.2: Provinsi Penerap Perda dari Tahun Ke Tahun.....	53
Gambar 2.3: Grafik Pasang Surut Jumlah Perda dari Tahun Ke Tahun.....	54
Gambar 3.1: Momentum Kejatuhan Orde Baru yang Membangkitkan Gerakan Kelompok Marginal.....	61
Gambar 3.2: Kebangkitan Islam Kelas Menengah Sebagai Dampak Politik Kejatuhan Orde Baru.....	64
Gambar 3.3: Syari'ah yang Merupakan Bagian dari Ideologi Politik Islam dalam Kaitannya dengan Perlawanan Terhadap Kolonialisme dan Diskusi Relasi Negara-Agama.....	67
Gambar 3.4: Peta Tipologi Diskursus Relasi Agama-Negara.....	69
Gambar 3.5: Manhaj al Fikr dan Kubu-Kubu Politik di Indonesia.....	93
Gambar 3.6: Diskursus Ideologi Politik Islam dan Kelahiran Perda Syari'ah..	95

Gambar 3.7: Parpol Sebagai Pengusung, Penyetuju, atau Penolak Perda Syari'ah.....	96
Gambar 3.8: Sirkulasi Tibal Balik Antara Pengusung Perda Syari'ah dan Parpol.....	101
Gambar 4.1: Dua Visi Pembangunan yang Berseberangan.....	112
Gambar 4.2: Struktur Konsep Kapabilitas Amartya Sen.....	121
Gambar 4.3: Model Proses dan Impelementasi Kebijakan Versi Jenkins.....	125
Gambar 4.4: Proses Pembuatan Perda menurut UU.....	126
Gambar 4.5: Proses potong kompas kelahiran mayoritas Perda Syari'ah.....	126

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Daerah, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Perda, merupakan kebijakan konstitutif yang diatur oleh undang-undang. Ia merupakan peraturan daerah yang dibuat oleh kepala pemerintah daerah bersama DPRD (Perda), atau yang dibuat oleh pemerintah daerah saja (Perkada), atau yang ditetapkan oleh DPRD saja, atau keputusan bersama antar kepala daerah yang satu dan kepala daerah yang lain (PB KDH); yang ditujukan untuk melaksanakan UUD '45 Pasal 18 (2) dengan berpedoman pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan peraturan-peraturan lain yang ada. Sedangkan Perda *Syarî'ah* adalah Perda yang secara langsung atau tidak langsung, implisit atau eksplisit, memuat peraturan-peraturan yang mengatur peri kehidupan beragama, atau ditujukan untuk melaksanakan ajaran, ideologi dan atau tradisi agama tertentu (baca: Islam).

Pengertian Perda dalam konteks yuridis ketatanegaraan merujuk pada perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 18 ayat 5 yang berbunyi:

“Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh Undang-Undang ditentukan ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.”

Dalam ayat (6) pasal tersebut dinyatakan pula:

*“Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas perbantuan”.*¹

Dalam konteks ini, maka seluruh peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah disebut sebagai Perda.

Konsiderans Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah pada Bab I Pasal 1 ayat (19) menyebutkan bahwa yang dimaksud produk hukum daerah adalah Perda (peraturan Daerah), Perkada (Peraturan Kepala Daerah), PB KDH (Peraturan Bersama Kepala Daerah), Peraturan DPRD, keputusan-keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan Badan Kehormatan DPRD.² Dengan demikian maka yang dimaksud dengan Perda dalam tesis ini adalah produk hukum daerah yang meliputi Perda, Perkada, PB KDH, Peraturan DPRD, keputusan-keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan Badan Kehormatan DPRD; yang untuk selanjutnya, semua bentuk produk hukum daerah tersebut disebut Perda, karena mempunyai dampak dan konsekuensi hukum yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Kemenkumham RI, *Panduan Praktis Memahami Perencanaan Peraturan Daerah*, Dirjen Peraturan dan Perundang-Undangan RI, (Jakarta: 2011), hlm. 1-8.

² Konsiderans Permendagri No. 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

sama.³ Perbedaannya hanya terletak pada wewenang di masing-masing bentuk Perda.⁴

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa: (a) Peraturan Daerah Propinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi bersama dengan gubernur; (b) Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama dengan bupati/walikota; (c) Peraturan Desa dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya; maka dalam konteks ini, Perda dibuat oleh kepala daerah bersama DPRD; maka yang dimaksud Perda adalah peraturan Kepala Daerah bersama DPRD.⁵ Adapun Perkada adalah Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Keberadaan Perkada diakui berdasarkan pasal 7 ayat (4) dan pasal 146 ayat (1) Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi:

“Untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah.”⁶

Pasal ini menegaskan bahwa Perkada dibuat sebagai peraturan lanjutan yang diamanahkan oleh Perda. Hal ini juga ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah pada Bab

³ Ibid, Pasal 5 ayat 2-5.

⁴ Konsiderans Permendagri No. 80 Tahun 2015.

⁵ Konsideran UU No. 10 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁶ Konsideran UU. No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

III Pasal 19 ayat 1 dan 2. Sebagai contoh adalah Peraturan Gubernur (Perkada) DKI Jakarta No 75 Tahun 2005 tentang kawasan dilarang merokok. Pergub ini merupakan kelanjutan dari ketentuan Pasal 24 Perda Provinsi DKI Jakarta No. 2 Tahun 2005 tentang pengendalian pencemaran udara. Namun, ada juga Perkada yang bukan merupakan bentuk “delegatif” dari Perda atau perundang-undangan sebelumnya. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Peraturan Daerah yang tidak melalui proses yang seharusnya disebut dengan diskresi yang bersandar pada asas *wetmatigheid van bestuur*. Diskresi diperlukan oleh pejabat publik untuk menghadapi berbagai persoalan penting, mendesak, yang tidak mungkin menunggu adanya perundang-undangan. Yang disebut mendesak sekurang-kurangnya harus memenuhi syarat: (1) menyangkut kepentingan umum; (2) Muncul secara tiba-tiba (di luar rencana); (3) Peraturan sebelumnya mengatur secara umum; (4) Prosedurnya tidak dapat diselesaikan menurut administrasi yang normal.⁷ Dasar tersebut masih diperkuat dengan Undang-Undang dan ketetapan pemerintah yang lain yang berkenaan dengan asas legalitas keberadaan Perda.

Permasalahan muncul tatkala Perda-Perda tersebut mulai mengatur masalah agama. Pasal 10 UU No. 32 Tahun 2004 merupakan pokok perdebatan seputar keabsahan Perda-Perda bernuansa *syarî'ah* tersebut. Pasal tersebut berbunyi: “Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang goleh UU ini

⁷ Konsideran UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Administrasi Pemerintahan.

ditentukan menjadi urusan Pemerintah; (2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan; (3) urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a) Politik luar negeri, (b) pertahanan, (c) keamanan, (d) yustisi, (e) moneter dan fiskal nasional, (f) agama.⁸ Perda yang mengatur dan berdasar pada Ideologi Islam kemudian dikenal dengan istilah Perda *Syarî'ah*.

Isu legalitas Perda *Syarî'ah* hanya merupakan salah satu isu kontroversial dari keberadaan Perda *Syarî'ah*. Di sisi lain, sebagai produk kebijakan publik, bila ditarik ke dalam konteks global, maka pertanyaan yang muncul adalah, apakah Perda *Syarî'ah* tersebut sinergis dengan konsep pembangunan global? Akira Lida, dalam *Paradigm Theory and Policy Making: Reconfiguring The Future*⁹, menggambarkan bahwa kebijakan publik di negara berkembang sebagai sebuah “konflik” antara kepentingan global dan kepentingan domestik. Salah satu paradigma pembangunan global adalah konsep tentang Pembangunan Manusia. Konsep Pembangunan Manusia, dalam konsep UNDP, secara teoritik diilhami oleh Teori Kapabilitas Amartya Sen yang menjelaskan bahwa landasan, metode, dan tujuan dari

⁸ Konsiderans UU No, 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

⁹ Akira Lida, *Paradigm Theory & Policy Making: Reconfiguring The Future*, (Tokyo, Tutttel, 2004), hlm. 204. Baca Juga: Riant Nurgorho, *Public Policy*, (Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2009), hlm. 381.

pembangunan adalah peningkatan kapabilitas manusia. Kapabilitas manusia tersebut kemudian dirumuskan oleh UNDP ke dalam tiga komponen, yaitu: (1) GDP (*Gross Domestic Product*), (2) Pendidikan, (3) Kesehatan. Penulis tertarik untuk meneliti bagaimana konstruksi Perda *Syari'ah* bila dilihat dari kacamata Kajian Kebijakan Publik dalam kaitannya dengan Konsep Pembangunan Manusia. Secara singkat, penelitian ini setidaknya memiliki tiga subtema utama, yaitu: (1) Perda *Syari'ah*; (2) konsep Pembangunan Manusia; (3) *modelling* kebijakan (*public policy*) Perda *Syari'ah*.

1. Perda *Syari'ah*

Pasca keruntuhan Orde Baru, Presiden Habibie mengeluarkan beberapa Undang-Undang (UU) yang mengindikasikan perubahan politik Indonesia dari suasana otoriter menjadi demokratis. Salah satu dari UU tersebut adalah UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diamandemen oleh UU No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. UU tersebut merubah wajah perpolitikan Indonesia dari sentralistik ke desentralistik. Seluruh individu dari kelompok, khususnya kelompok muslim marginal pada masa pemerintahan Soeharto memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperjuangkan penerapan *Syari'at* Islam di Indonesia dengan menerbitkan berbagai Perda terkait *Syariah* di banyak provinsi. Dari sini bisa dikatakan bahwa kemunculan Perda *Syari'ah* dimulai bersamaan dengan

kemunculan UU tentang Otonomi Daerah. Propinsi yang mula-mula menerapkan Perda *Syarī'ah* adalah Propinsi Nangroe Aceh Darussalam¹⁰.

Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) pada era reformasi diberi kewenangan kembali untuk melaksanakan *Syariat* Islam. Kewenangan ini dilandaskan pada payung hukum berupa UU No. 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh, UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Payung hukum tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan Perda atau *Qānūn* pada tingkat Provinsi NAD. Pemerintah Aceh menerbitkan Perda pertama, Perda Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan *Syariat* Islam di Aceh. Perda ini dikeluarkan untuk merealisasikan kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat melalui UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh¹¹.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sepertinya terinspirasi dari UU No 44 tahun 1999, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah Provinsi Aceh untuk menerapkan *Syarī'ah* Islam. Dengan landasan undang-undang yang berbeda, UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun

¹⁰ Wasisto Raharjo Jati, "Permasalahan Implementasi Perda Syariah Dalam Otonomi Daerah," *Al-Manahij* 7, no. 2 (Jakarta: 2013), 305–318.

¹¹ UU Republik Indonesia No 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No.172).

1999, yang diamandemen melalui UU No. 32 Tahun 2004, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerbitkan Perda tentang Pencegahan Perbuatan Maksiat dan Prostitusi.¹²

Geliat kelahiran Perda *syari'ah*, di Kabupaten Pamekasan, misalnya, sudah terlihat sejak tahun 2000-an dengan terbentuknya FOKUS (Forum Komunikasi Umat Islam) dan LP2SI (Lembaga Pengkajian dan Penerapan *Syari'ah* Islam)¹³. Dari situ kemudian berturut-turut muncul larangan peredaran dan konsumsi minuman beralkohol (Perda No. 18 Tahun 2001);¹⁴ Proklamasi Gerbang Salam (4 November 2002) yang menjadi “penanda” akan komitmen Kabupaten Pamekasan untuk menjadi kabupaten yang *syari'i*¹⁵. Deklarasi itu disusul Surat Edaran Bupati No. 450/2002 ke berbagai instansi pemerintah dan lembaga pendidikan berisi antara lain: 1) himbauan agar para pegawai muslim dan muslimah mengenakan baju koko, kopiah dan jilbab setiap hari Jumat; 2) menghentikan kegiatan ketika adzan berkumandang; 3)

¹² Franz von Benda-Beckmann & Keebet von Benda-Beckmann, “Identity in Dispute: Law, Religion, and Identity in Minangkabau,” *Asian Ethnicity* 13, no. 4, 2012, 341–358; Aulia Rahmad, “Reaktualisasi Nilai Islam Dalam Budaya Minangkabau Melalui Kebijakan Desentralisasi,” *El-Harakah* 13, no. 1, 2011, 1–33.

¹³ LP2SI dibentuk secara resmi Bupati dengan SK Bupati Pamekasan No. 188/126/441.012/2002. Lembaga ini beranggotakan individu-individu dari partai politik, organisasi sosial keagamaan, birokrat, akademisi dan para ulama.

¹⁴ Lihat Lembaran Daerah kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun 2001 Seri C, yang ditandatangani oleh Bupati Dwiatmo Hadiano.

¹⁵ Agus Purnomo, *Politik Hukum Elit Politik Kabupaten Pamekasan Tentang Perda Syari'at*, STAIN Ponorogo, (tt., tt.), hlm. 4.

memberi jeda shalat berjamaah di kantor; 4) mengadakan pengajian rutin sebulan sekali; 5) memberi tambahan waktu pelajaran agama di lembaga pendidikan, mulai sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Surat edaran ini diterbitkan ulang ketika Moh. Syafi'ie menjabat sebagai bupati (2004-2009) menggantikan Dwiatmo Hadiano.¹⁶ Setelah Deklarasi Gerbang Salam dan SE Bupati, kemudian muncul berturut-turut Perda No. 18 Tahun 2004 Tentang Larangan Terhadap Pelacuran; Perda No. 7 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Zakat, *Infah* dan *Shadaqah*; Perda No. 5 Tahun 2010 Tentang Hibah Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji; Peraturan Bupati (Perbup) No. 40 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Agama; Keputusan Bupati No. 188 Tahun 2009 Tentang Penetapan Gerbang Salam sebagai model dan strategi dakwah. Terakhir, saat ini muncul wacana perda pemberlakuan jam malam bagi kalangan perempuan.¹⁷

Model penerapan *Syari'ah* di Kabupaten Pamekasan melalui Perda, Perbup, dan SE (Surat Edaran) Bupati di Kabupaten Pamekasan memperlihatkan kekuatan politik Islam yang cukup sistematis. Hal ini wajar bila melihat struktur masyarakat Madura khususnya Kabupaten Pamekasan yang 97% beragama Islam dengan tradisi keagamaan yang sangat kuat. Di

¹⁶ Ahmad Zainul Hamdi, "Syari'at Islam dan Pragmatisme Politik: Studi Kasus Penerapan Syari'at Islam di Pamekasan", dalam *Agama dan Kontestasi Ruang Publik: Islamisme, Konflik, dan Demokrasi*, ed Badrus Syamsul Fata, The Wahid Institute, (Jakarta, 2011), hlm. 32.

¹⁷ Agus Purnomo, *Politik Hukum Elit Politik...* hlm. 3.

samping itu, rupanya lembaga-lembaga Pesantren yang cukup banyak, mempunyai kekuatan politik yang cukup besar dalam perebutan kekuasaan dalam Pemilu. Tercatat bahwa restu pesantren besar seperti Mamba'ul Ulum Bata-bata dan Banyuwangi memberi legitimasi lebih kepada calon bupati yang sedang berlaga dalam pemilu.¹⁸

Berbeda dengan yang terjadi di Kabupaten Bantul Yogyakarta. Deklarasi Yogyakarta sebagai Kota Toleransi Oleh Gubernur Yogyakarta pada pertengahan tahun 2016 menjadikan kota Yogyakarta terlihat semakin heterogen dengan berbagai etnik dan agama. Namun demikian, kekuatan Islam sebagai kekuatan kultural terbesar di Yogyakarta juga berperan dalam kelahiran beberapa Perda yang “bernuansa” Islam, di antaranya adalah Perda Kabupaten Bantul No. 5 Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul.¹⁹ Beberapa contoh di atas menggambarkan bahwa kekuatan politik Islam berperan aktif di berbagai model dan bentuk masyarakat di Indonesia untuk memperjuangkan tegaknya *syarî'ah* dalam berbagai bentuk regulasi.

Konstitusi Indonesia sejatinya tidak mengenal istilah Perda *Syarî'ah*. Perda *Syarî'ah* adalah istilah para sarjana untuk menggambarkan undang-undang dan Peraturan Daerah yang dibuat berlandaskan (terkait) Hukum

¹⁸ Ibid, hl 6.

¹⁹ Konsideran Perda Kabupaten Bantul No. 5 Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran.

Islam (*syarî'ah*) seperti *Qânûn* di NAD yang secara detil eksplisit mengatur tentang penerapan *Syarî'ah* Islam atau pun yang secara implisit seperti pelarangan Miras²⁰.

2. Diskursus Konsep Pembangunan Manusia Global

Negara-negara di dunia diklasifikan ke dalam 2 peringkat negara, yaitu Negara Maju dan Negara Berkembang. Negara Berkembang sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu: (a) Tinggi, (b) Menengah, dan (c) Rendah. Pengklasifikasian ini didasarkan pada Peringkat IPM (Indeks Pembangunan Manusia). IPM sendiri mempunyai tiga indikator, yaitu: (1) pendidikan, (2) kesehatan, dan (3) pendapatan. Pengkategorian ini menemukan signifikansinya dalam diskursus pembangunan, bahwa pembangunan tidak hanya diukur oleh PDB (Produk Domestik Bruto), tetapi menyertakan dua indikator penting yang dianggap representatif mewakili keseluruhan produk pembangunan, yaitu berupa tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan masyarakat. Reduksi ini berangkat dari teori Amartya Sen tentang apa yang disebutnya dengan “Kapabilitas” (*Capability*) yang intinya menyebutkan bahwa pembangunan yang sehat hanya bisa dilakukan dengan cara

²⁰ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang, Aneka Ilmu, 2003), 231; Mohamad Guntur Romli, “Siswi-Siswi Kristen Pun Terpaksa Berjilbab; Kewajiban Busana Muslim Di Kota Padang,” *Jurnal Perempuan* 60 (Jakarta, 2008), 81–92.

memaksimalkan kapabilitas setiap orang.²¹ Untuk mencapai kapabilitas yang maksimal ini maka diskriminasi harus dihapuskan, kesempatan dibuka selebar-lebarnya, dan keadilan harus ditegakkan. Konsep ini mencoba mencari solusi bagi ketimpangan-ketimpangan pembangunan yang terjadi di dunia di mana pemerataan tidak dipertimbangkan untuk menjadi bagian terpenting dari pembangunan. Implikasi dari teori Amartya Sen ini berdampak signifikan bagi lahirnya ide-ide “pemerataan kesempatan” tanpa adanya diskriminasi, dan terbentuknya masyarakat yang inklusif.²² Konsep ini kemudian diadaptasi oleh UNDP untuk menjadikan PDB, Pendidikan, dan Kesehatan, sebagai tolak ukur (indikator) ketercapaian pembangunan di sebuah negara. Tiga hal itu dianggap mewakili kapabilitas manusia untuk tumbuh, berkembang, secara sehat.²³

Deskripsi teori di atas merupakan landasan untuk kemudian melihat Perda *Syarî'ah* dalam kacamata diskursus Pembangunan Manusia. Ada beberapa alasan penting untuk menjadikan perihal ini sebagai obyek penelitian. *Pertama*, Perda (Peraturan Daerah) merupakan kebijakan Pemerintah Daerah dalam bentuk regulasi untuk mengatur pemerintahan

²¹ Michael P. Todaro & Stephen C. Smith, *Economic Development*, Edisi ke 11, (New York, Addison Wesley, 2010).

²² Mudjarat Kuncoro, *Ekonomika Pembangunan*, (Jakarta, Penerbit Erlangga, 2010), hlm. 136-151.

²³ Theodore W. Schultz, “Chapter 5.”, 1964, seperti dikutip oleh: E. Wayne Nafziger, *Economic Development*, (New York, Cambridge University Press, 2006), 335.

daerah sesuai dengan visi dan misi kepala daerah yang selanjutnya diterapkan dalam bentuk RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Perda *Syarî'ah* merupakan bagian dari visi dan misi Kepala Daerah bersama DPRD untuk membangun daerahnya. Dus, dengan demikian maka pertanyaannya adalah: apakah Perda-Perda tersebut sinergis dengan konsep pembangunan global sehingga *out come* yang dihasilkan mendukung Daerah untuk bersinergi dengan Pemerintah Pusat dan kancan Internasional? Alasan *kedua* adalah, secara umum dapat dibaca bahwa konstelasi politik dalam pemilu sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemangku jabatan publik. Berkenaan dengan ini maka pertanyaannya adalah, sejauh mana konstelasi politik dan faksi-faksi ideologis mempengaruhi kelahiran dan isi dari Perda *Syarî'ah*? Sehingga dapat dikatakan bahwa Perda *Syarî'ah* merupakan aspirasi nyata untuk kebaikan bersama dan bukannya untuk kepentingan “kubu” politik tertentu.

3. Analisa Kebijakan Publik Terhadap Perda *Syarî'ah* Terkait Konsep Pembangunan Manusia

Sebuah kebijakan, dalam teori Kebijakan Publik, dapat diapresiasi sebagai bagian dari satu di antara dua hal, yaitu berpijak pada *political standing*, atau *ideological standing*. *Political standing* artinya bahwa sebuah kebijakan berpijak dan berfokus pada kehendak politik masyarakat. Dalam hal

ini maka pertanyaan mendasarnya adalah: seberapa jauh kebijakan pemerintah bertaut dengan kebutuhan publik? Sementara *ideological standing* menggambarkan bahwa sebuah kebijakan berpijak pada ideologi tertentu. Ketika berbicara tentang ideologi tertentu maka setidaknya ada dua kemungkinan, yaitu (1) apakah itu kelompok tertentu (baik mayoritas atau minoritas), atau (2) memang kehendak ideologi politik masyarakat yang bertaut langsung secara faktual dengan kebutuhan publik. *Political standing* biasanya berpijak pada pemahaman inter-subyektif²⁴, sedangkan *ideological standing* biasanya berpijak pada pemahaman doktrin, atau kehendak dari ideologi tertentu.

Dari posisi analisis, ada dua posisi yang diambil oleh analisis kebijakan publik, yaitu analisis untuk kebijakan dan analisis terhadap kebijakan. Pada posisi yang pertama (analisis untuk kebijakan), seorang analisis memposisikan diri sebagai bagian dari pemangku kebijakan yang akan membuat dan menerapkan sebuah kebijakan. Ia berdiri bersama kepentingan pemangku kebijakan. Sedangkan pada posisi yang kedua (analisis terhadap kebijakan), seorang analisis memposisikan diri sebagai pengamat kebijakan atau bahkan sasaran dari sebuah kebijakan.²⁵ Berkenaan dengan itu, maka posisi penulis di sini menempatkan dirinya pada posisi yang kedua, yaitu analisis terhadap kebijakan

²⁴ Purwo Santoso, *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta, RRCRG UGM, 2010), hlm. 8

²⁵ Ibid, hlm. 5.

Perda *Syarî'ah* yang diterapkan di Indonesia. Hal ini sesuai dengan *out come* yang diharapkan dari hasil penelitian ini kelak, yaitu memberikan analisa teoritik dari fakta-fakta di lapangan berkenaan dengan sinergitas dan koherensi Perda *Syarî'ah* dan Konsep Pembangunan Manusia Global dalam kerangka Studi Kebijakan Publik terhadap sebuah kebijakan berupa Perda *Syarî'ah*.

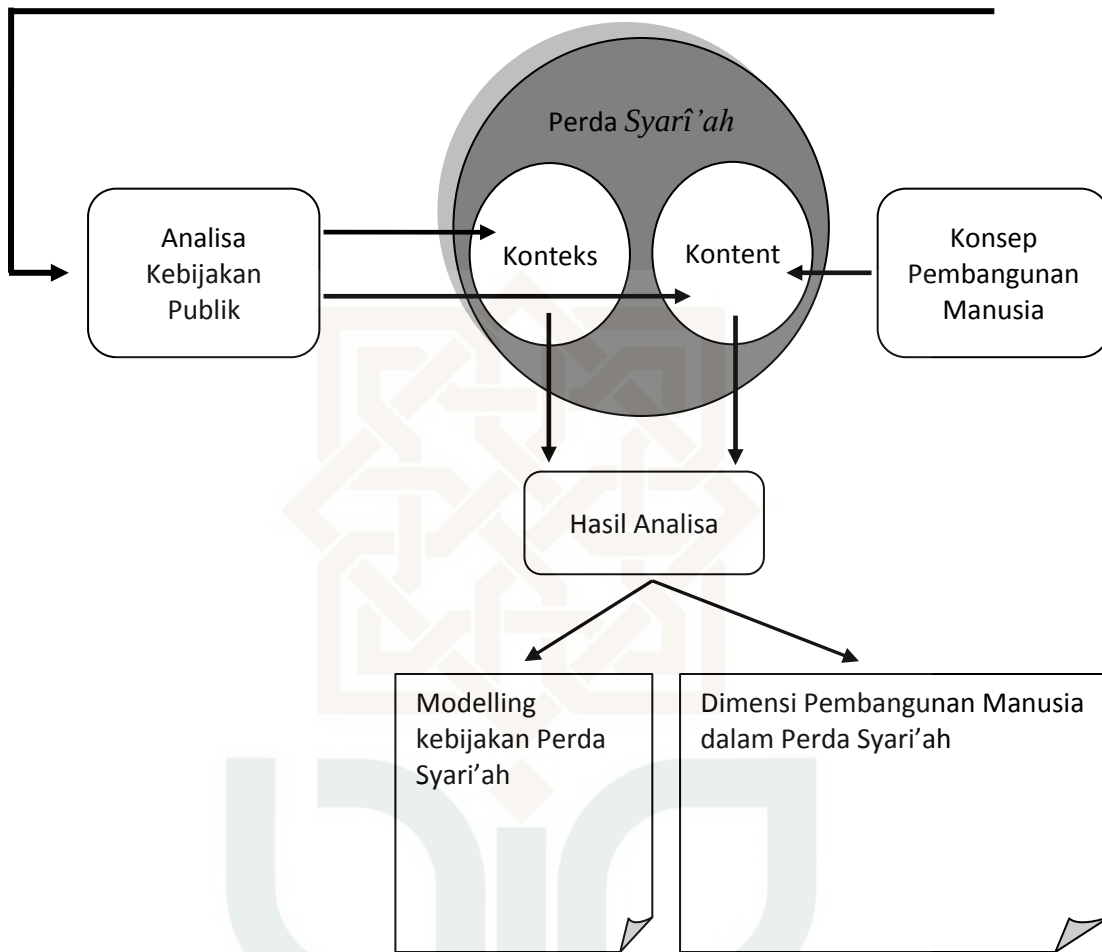
B. Rumusan Masalah

Mensarikan apa yang dipaparkan dalam latar belakang di atas, peneliti secara mendalam akan menelusuri tentang:

1. Bagaimana logika sosial dan politik (setting sejarah) lahirnya Perda *Syarî'ah* di Indonesia?
2. Bagaimana ketercapaian IPM Model Amartya Sen dalam implemementasi dan evaluasi Perda *Syarî'ah* di Kota Bogor, Tasikmalaya, dan Bulukumba?

Dua pertanyaan tersebut setidaknya mencakup empat hal pokok, yaitu: (1) Seperti apa konteks pemberlakuan Perda *Syarî'ah* di Indonesia?; (2) Apa saja konten Perda *Syarî'ah* di Indonesia?; (3) Bagaimana gambaran setting sejarah kebijakan Perda *Syarî'ah*?; (4) Bagaimana deskripsi IPM di Kota Bogor, Tasikmalaya, dan Bulukumba terkait penerapan Perda *Syarî'ah* di daerah tersebut?.

Gambar: 1.1



Gambar: 1.1: *Modelling Penelitian Dimensi Pembangunan Manusia Dalam Perda Syari'ah Sebagai Kebijakan Publik.*

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendapatkan gambaran tentang hasil analisa Konteks Pemberlakuan Perda *Syarî'ah*.
- b. Mendapatkan gambaran tentang klasifikasi konten Perda *Syarî'ah*.
- c. Menemukan penjabaran konkrit tentang senergitas indikator pembangunan manusia menurut Perda *Syarî'ah* dan Konsep Pembangunan Manusia global.
- d. Mendeskripsikan analisa Kebijakan Publik terkait Pembangunan Manusia dalam Perda *Syarî'ah*.

2. Kegunaan penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai beberapa kegunaan, di antaranya:

- a. Memberikan penjelasan yang komprehensif tentang klasifikasi Perda *Syarî'ah*.
- b. Menjelaskan secara teoritik dimensi Pembangunan Manusia dalam Perda *Syarî'ah* dalam kerangka Studi Kebijakan Publik.

- c. Menjelaskan kohensi dan sinergitas antara Perda *Syarî'ah* dan Konsep Pembangunan Manusia global.
- d. Penelitian ini diharapkan berguna sebagai pertimbangan perumusan kebijakan publik.

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang Perda *Syarî'ah* rupanya bukan penelitian asing lagi di kalangan akademisi Indonesia bahkan mancanegara. Beberapa jurnal, buku, skripsi, tesis, hingga disertasi yang mengacu pada diskursus Perda *Syarî'ah* dapat ditemukan dengan mudah. Penulis mengelompokkan temuan pustaka tersebut ke dalam beberapa klasifikasi sebagai berikut. *Pertama*, Perda *Syarî'ah* dan Konstitusi Negara Republik Indonesia. Dalam wacana ini, dapat kita temukan beberapa tulisan, di antaranya (1) Tesis Ardi Saputra, mahasiswa pascasarjana UII yang berjudul: *Hukum Islam dan Konstitusi Negara Republik Indonesia*, yang mengupas tuntas benturan wacana Perda *Syarî'ah* bila dilihat dari konstruksi Hukum Negara dan HAM.²⁶ (2) Tulisan Wasisto Rahardjo Jati dalam Jurnal *Al Manahij* yang berjudul “Permasalahan Implementasi Perda *Syarî'ah* Dalam Otonomi Daerah” yang mengupas tentang polemik Perda *syarî'ah* dalam konstruksi Otonomi Daerah.²⁷ (3) Tulisan A. Qadri Azizy yang

²⁶ Ardi Saputra, *Hukum Islam Visa a Vis Konstitusi Negara Republik Indonesia*, (Thesis), (Yogyakarta, Fakultas Hukum UII, 2000).

²⁷ Jati, Wasisto Raharjo. “Permasalahan Implementasi Perda Syariah Dalam Otonomi Daerah.” *Al-Manahij* 7, no. 2 (Jakarta, 2013), 305–318.

berjudul “Elaktisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum”. Buku ini mengupas tentang tarik ulur koherensi antara Hukum *Syarî’ah* (termasuk di dalamnya Perda *Syarî’ah*) dan Hukum Formal yang berlaku di Indonesia.²⁸

Kedua, Perda Syarî’ah dalam Kajian Historis. Secara historis, perihal Perda *Syarî’ah* dapat kita telusuri dalam beberapa tulisan berikut, (1) Tesis Rudi Hermawan yang berjudul *Historitas Perda Syarî’ah: Tinjauan Historis Korelasi Perda Syarî’ah dan Gerakan Islam di Indonesia*. Mahasiswa Fakultas Hukum UGM ini menulis tesisnya yang berisi tentang tinjauan historis kelahiran Perda *Syarî’ah* di berbagai tempat.²⁹ (2) Tulisan Robin Bush yang berjudul *Regional Sharia Regulation in Indonesia : Anomaly or Symptom?* dalam *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*. Tulisan ini mengupas Ekspresi keberagamaan di Indonesia dalam konteks historis.³⁰ (3) Tulisan Robert W. Hefner yang berjudul: Hefner, Robert W. “*Indonesia: Shari’a Politics and Democrtatic Transition.*” Dalam *Shari’a*

²⁸ Azizy, A. Qodri, *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Cet. I, (Yogyakarta, Gama Media, 2002).

²⁹ Rudi Hermawan, *Historitas Perda Syari’ah, Tinjauan Korelasional antara Perda Syari’ah dan Gerakan Islam di Indonesia*, (Thesis), (Yogyakarta, Fakultas Hukum UGM, 2004).

³⁰ Bush, Robin. “Regional ‘Sharia’ Regulations in Indonesia: Anomaly or Symptom?” In *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*, edited by Greg Fealy & Sally White, 174–191. (Singapore: Institute of Southeast Asia Studies, 2008).

Politics: Islamic Law and Society in the Modern World. Tulisan ini mengupas sisi historis-politis dari perkembangan Hukum Islam di Indonesia.³¹

Ketiga, Implikasi Perda Syari'ah (Dampak dan Konsekuensi). Berkenaan dengan dampak Perda Syari'ah secara sosial, politik, dan ekonomi dapat kita temukan dalam beberapa tulisan berikut, (1) Tesis Yulia Mahmudah yang berjudul: "Dampak Penerapan Perda Syari'ah Terhadap Kerukunan Umat Beragama: Studi Kasus Perda Syari'ah di NAD". Yulia dalam tesisnya memaparkan tentang dampak penerapan Perda Syari'ah dalam konteks hubungan antar agama di NAD.³² (2) Tulisan Sukron Kamil yang berjudul *Syariah Islam Dan HAM: Dampak Perda Syariah Terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan, Dan Non-Muslim*. Tulisan ini mengulas tentang dampak Perda Syari'ah terhadap kondisi HAM yang berkenaan dengan gender dan relasi hubungan antar agama.³³ (3) Tulisan Suismanto yang berjudul "Perda Syariat Islam Dan Problematikanya: Kasus Tasikamajaya." Tulisan ini

³¹ Hefner, Robert W. "Indonesia: Shari'a Politics and Democratic Transition." In *Shari'a Politics: Islamic Law and Society in the Modern World*, edited by Robert W Hefner. Bloomington, (Indiana: Indiana University Press, 2011).

³² Yulia Mahmudah, *Dampak Penerapan Perda Syari'ah Terhadap Kerukunan Umat Beragama: Studi Kasus Perda Syari'ah di NAD*, (Thesis), (Yogyakarta, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

³³ Ali, Sukron Kamil et. *Syariah Islam Dan HAM: Dampak Perda Syariah Terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan, Dan Non-Muslim*, ed. Sukron Kamil & Chaider S Bamualim, (Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture & Konrad Adenauer Stiftung, 2007).

menyoroti tentang Perda *Syari'ah* di Tasik Malaya dan problematika sosial yang dihadapinya.³⁴

Keempat, Kajian Tentang Pembangunan Manusia. Literatur tentang Kajian Pembangunan Manusia banyak dijumpai dalam kerangka kajian Teori Pembangunan, di antaranya, (1) Tesis Luthfi Hasyim yang berjudul: “Pembangunan Manusia dalam Teori Kapabilitas Amartya Sen.” Tulisan ini membahas tentang pengembangan Indeks Pembangunan Manusia UNDP yang berakar dari teori kapabilitas Amartya Sen.³⁵ (2) Tulisan Amartya Sen yang berjudul: *Development As Freedom*. Tulisan ini mengupas tentang “pembangunan” dalam kerangka pembebasan manusia dari ketertindasan. Tulisan Sen kemudian menjadi rujukan PBB untuk merumuskan Indeks Pembangunan Manusia.³⁶ (3) Tulisan Todaro yang berjudul *Economic Development*. Tulisan ini, dalam sub bab-nya, mengupas tentang isu konseptual seputar Pembangunan Manusia.³⁷

Kelima, tulisan-tulisan yang berhubungan Perda *Syari'ah* di beberapa daerah:

(1) Tulisan Ahmad Zainul Hamdi, “Syariat Islam dan Pragmatisme Politik: Studi

³⁴ Suismanto. “Perda Syariat Islam Dan Problematikanya: Kasus Tasikamalaya.” *Aplikasia, Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama* 8, no. 1 (Jakarta, 2007).

³⁵ Luthfi Hasyim, *Pembangunan Manusia dalam Teori Kapabilitas Amartya Sen*, (Thesis) (Yogyakarta, Fakultas Ekonomi UGM, 2006).

³⁶ Amartya Sen, *Development As Freedom*, Alfred A. Knopf, (New York, 2000).

³⁷ Michael P. Todaro & Stephen C. Smith, *Economic Development*, Edisi ke 11, (New York, Addison Wesley, 2010).

Kasus Penerapan Syariat Islam di Pamekasan Madura,” dalam *Agama dan Kontestasi Ruang Publik*.³⁸ (2) Tulisan Sahid, “Formalisasi Syariat Islam Dalam Konstruksi Kyai NU Struktural Jawa Timur”. Yang di dalamnya juga mengupas tentang Perda Kabupaten *syari’ah* di Kabupaten Pamekasan.³⁹ (3) Tulisan M. Ghuftron tentang *Gerakan Islam di Yogyakarta*, yang membahas tentang perjuangan politik organisasi-organisasi keislaman di Yogyakarta.⁴⁰

Tulisan lainnya berkenaan dengan Pembangunan Manusia, dapat kita temukan beberapa tulisan sebagai berikut: (1) Tulisan William F. O’neil, *Educational Idologies: Contemporary Expressions od Educational Philosophies*, yang diberi pengantar oleh Mansoer Fakhri, mengupas tentang kecenderungan ideologis visi pembangunan di dunia.⁴¹ (2) Tulisan I.N. Thut & Don Adams, *Educational Patterns in Contemporary Societies*, yang mengulas tentang peran signifikan pendidikan dalam konteks Pembangunan Manusia Global.⁴²

³⁸ Ahmad Zainul Hamdi, “Syariat Islam dan Pragmatisme Politik: Studi Kasus Penerapan Syariat Islam di Pamekasan Madura,” dalam *Agama dan Kontestasi Ruang Publik*. “ed.” Badrus Samsul Fata (Jakarta: The Wahid Institute, 2011), 115.

³⁹ Sahid, “Formalisasi Syariat Islam Dalam Konstruksi Kyai NU Struktural Jawa Timur”. (Disertasi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009), 134-144.

⁴⁰ M. Ghuftron, *Politik Islam di Yogyakarta*, (Yogyakarta: Diva Press, 2009), 20-50.

⁴¹ William F. O’neil, *Educational Idologies: Contemporary Expressions od Educational Philosophies*, (California, Good Year Publishing Company [GPC], 1981).

⁴² I.N. Thut & Don Adams, *Educational Patterns in Contemporary Societies*, (Ney York 1984), McGraw-Hill Book Company, hlm. 37-39.

Berdasarkan temuan literatur di atas, posisi penelitian ini berada dalam tema yang sedikit berbeda, yaitu dalam kerangka diskursus Perda *Syarî'ah* dalam konteks Pendidikan dan Pembangunan Manusia, yang di dalamnya tidak hanya berisi hasil riset tentang dimensi pendidikan dalam beberapa Perda *Syarî'ah*, melainkan juga berisi tentang kontekstualisasinya Perda *Syarî'ah* dalam konteks Pembangunan Manusia Global.

E. Kerangka Konsep

Merujuk pada Riant Nugroho⁴³ dalam *Public Policy* bahwa dalam ranah Kajian Publik ada dua hal yang secara tegas harus dibedakan, yaitu antara *Analysis of Policy* (analisis terhadap kebijakan) dan *Analysis For Policy* (analisis untuk kebijakan). Konsep ini selaras dengan konsep Michael Hill dalam *Policy Process*⁴⁴ di mana Hill mempergunakan pemikiran Gordon, Lewis, dan Young dalam *Perspective on Policy Analysis* dan Hogwood dan Gunn dalam *The Policy Orientation*. Analisis terhadap kebijakan, menurut Riant lagi, adalah sinonim dengan Penelitian Kebijakan, yaitu sebuah tindakan penelitian yang dirumuskan untuk meneliti tentang kebijakan yang sudah ada dalam kerangka studi akademik. Sedangkan analisis untuk kebijakan adalah analisa yang bertujuan untuk mengevaluasi dan mengadvokasi kebijakan yang sudah ada atau untuk membuat kebijakan baru dengan hasil penelitian tersebut.

⁴³ Riant Nugroho, *Public Policy*, hlm. 192

⁴⁴ Michael Hill, *The Policy Process, A Reader*, (New York, Simon & Schuster, 1993), hlm. 102.

Contoh kongkrit dari analisis untuk kebijakan adalah Naska Akademik (NA) yang dibuat untuk merumuskan sebuah peraturan atau undang-undang. Perbedaan kedua hal tersebut menjadi urgen karena akan membedakan proses dan hasil akhir dari sebuah penelitian.⁴⁵

Berkenaan dengan teori Penelitian Kebijakan di atas, maka dalam hal ini kedudukan penelitian dalam tesis ini adalah dalam kerangka *analysis of policy*, yang menurut Riant Nugroho mempunyai, setidaknya, lima kategori penelitian, yaitu: (1) Penelitian tentang isi kebijakan; (2) Penelitian implementasi kebijakan; (3) Penelitian tentang kinerja kebijakan; (4) Penelitian tentang lingkungan kebijakan; (5) Penelitian tentang proses kebijakan⁴⁶. Dalam konteks ini, penulis memilih untuk mengambil kategori yang pertama, yaitu penelitian tentang konten kebijakan dalam Perda Syari'ah.

Dalam konteks penelitian ini, penulis akan menggunakan model proses dan implementasi Kebijakan Publik versi Jenkins (1978)⁴⁷. Model tersebut menggambarkan bahwa sebuah kebijakan dilahirkan dari kebutuhan dan aspirasi masyarakat⁴⁸ untuk kemudian diproses dalam ranah politik sebelum memasuki ranah birokrasi. Di sinilah titik temu antara teori kebijakan dan Perda Syari'ah yang

⁴⁵ Riant Nugroho, *Public Policy*, Hlm. 192.

⁴⁶ Ibid, hlm, 198.

⁴⁷ William Jenkins, *Policy Analysis: A Political and Organizational Perspective*, (New York, St. Martin's Press, 1978), hlm. 30.

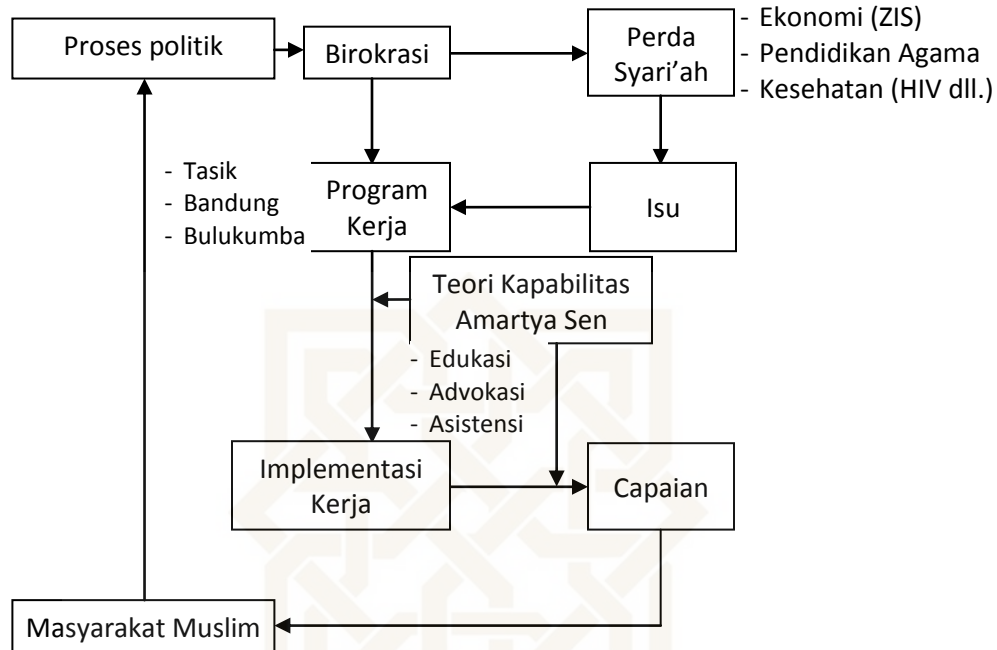
⁴⁸ Ibid

kemudian ditindaklanjuti dengan program dan implemtasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat.⁴⁹ Dengan mengambil sampel di 3 daerah (Kota Bandung, Bulukumba, dan Tasikmalaya) sebagai representasi dari Kebijakan dengan Tema Pendidikan, Ekonomi, dan Kesehatan (Sesuai indikator teknis Pembangunan Manusia UNDP), penulis akan membedah seperti apa kondisi penerapan Perda Syari'ah yang dimaksud dari sudut pandang Kebijakan Publik versi Jenkins dan Pembangunan Manusia versi Amartya Sen.



⁴⁹ Ibid.

Gambar: 1.2



Gambar 1.2: Studi Kebijakan Publik dalam pencapaian IPM model Jenkins dan Amartya Sen

Teori Minor dalam penelitian ini adalah teori Pembangunan Manusia. Teori ini diprakarsai oleh Amartya Sen dengan konsep kapabilitasnya, bahwa, dunia ini bisa dibangun menjadi lebih baik dengan cara memberdayakan manusia. Tujuan pembangunan bukan semata untuk “mencapai” hal-hal yang bersifat materil, tetapi lebih dari itu, tujuan pembangunan adalah untuk memberdayakan manusia. Dari teori kapabilitas ini dibangun sebuah asumsi bahwa pembangunan harus (1) meminimalisir dampak buruk (efek) dari pembangunan; (2) memberikan pelayanan terbaik untuk memberdayakan manusia; (3) menghindari diskriminasi; (4) menghilangkan ketimpangan ekonomi dan sosial dan memperluas pemerataan; (5) membangun

sebuah sistem pembangunan yang sustainabel (berkelanjutan) dan berkeadilan tidak hanya dalam satu generasi tetapi juga antar generasi.⁵⁰

Rumusan Amartya Sen tentang konsep Kapabilitas kemudian diadaptasi oleh UNDP (*United Nation Development Programme*), sebuah lembaga di PBB yang menangani masalah-masalah pembangunan, untuk merumuskan indikator-indikator pembangun dalam konsep Pembangunan Manusia Global untuk meratifikasi dan memeringkat negara-negara di dunia. Hasil dari rumusan UNDP ini kemudian membuahkan hasil bahwa ada tiga hal yang bisa menjadi tolak ukur “kapabilitas” manusia, yaitu: (1) pendidikan, (2) kesehatan, (3) ekonomi. Tiga hal itulah yang kemudian dijadikan indikator pembangunan dunia dan disusun dalam sebuah indeks khusus yang disebut sebagai *Human Development Indeks* (HDI).⁵¹

Tabel 1.1: Alur analisa terhadap konten Perda Syari’ah.

Konsep Etik Amartya Sen	Indikator Pembangunan UNDP	Jenis Data
Teori Kapabilitas	- Kesehatan - Pendidikan - Pendapatan (GDP)	Konten

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa sebuah kebijakan selalu terkait dengan konteks lokal (domestik) maupun global, maka patut diteliti bagaimana

⁵⁰ Amartya Sen seperti dikutip Agus Suryono, *Dimensi-dimensi Prima Teori Pembangunan*, (Malang, UNIBRAW, 2010), 125-214.

⁵¹ Ibid.

konstruksi Perda *Syarî'ah* dalam konteks konsep pembangunan manusia global? Apakah dampaknya? Bagaimana koherensi keduanya? Di sinilah posisi penulis sebagai peneliti menjadi tegas dengan mengambil tema: Dimensi Pembangunan Manusia dalam Perda *Syarî'ah* dalam kerangka kajian publik, yang di dalamnya memuat data dan analisa terhadap konteks dan konten Perda *Syarî'ah* berkenaan dengan konsep pembangunan manusia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*documentary/library research*) terhadap konteks dan konten Perda *Syarî'ah* dengan model Deskriptif-Analitis yang menggunakan *Basic Theory* dari Ilmu Kebijakan Publik dan Ilmu Pembangunan. Model ini merujuk pada Bogdan dan Biklen, seperti yang dikutip oleh Maryani⁵², dalam *Public Policy* karya Riant Nugroho.⁵³

Model ini menekankan bahwa Analisa Kebijakan Publik merupakan jenis penelitian sosial yang dapat mengambil bentuk yang bermacam-macam, di antaranya adalah penelitian pustaka (dokumentasi), yaitu

⁵² Riant Nugroho, *Public Policy*,hlm. 169.

⁵³ Ibid.

penelitian yang pengambilan datanya bersumber dari dokumen, literasi, atau situs tertentu yang berkaitan dengan obyek penelitian.

Tabel 1.2: *Jenis Penelitian, Model, Basic Theory, dan Rujukan*

Jenis Penelitian	Model	<i>Basic Theory</i>	Rujukan Model
<i>Documentary/library research</i>	Deskriptif-analitis	Ilmu Kebijakan Publik & Ilmu Pembangunan	Bogdan dan Biklen

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Kualitatif dengan *multi-metode*. Metode *pertama* adalah metode analisis data sekunder⁵⁴, yaitu analisa terhadap data yang telah diperoleh pihak lain. Metode *kedua* adalah *grounded research*,⁵⁵ yaitu proses pencarian data sebanyak-banyaknya tanpa berbekal hipotesis, dengan tujuan mendeskripsikan peristiwa dan menformulasikan penjelasan perihwal munculnya peristiwa tersebut. Metode *ketiga* adalah metode deskripsi murni dan deskripsi komparatif, yang memfokuskan untuk meneliti tentang

⁵⁴ Yang dimaksud data sekunder adalah data yang telah diperoleh pihak lain, seperti data-data dari badan resmi seperti BPS, atau perseorangan.

⁵⁵ Riant Nugroho, Public Policy, ... hlm. 174.

kompetisi antar kelas dalam Perda *Syarî'ah*. Metode *keempat* adalah metode analisis isi dan jaringan.⁵⁶

Tabel 1.3: *Pendekatan, Metode, dan Rujukan*

Pendekatan	Metode		Rujukan
Kualitatif	<i>Multi-metode</i>	Analisis data sekunder	Majchrzak & Danim
		<i>Grounded</i>	Danim
		Deskripsi murni & deskripsi komparatif	Mohammad Nazir
		Analisis isi & jaringan	Steve, Knoke & Kuklinsi

Sukardi, dalam bukunya *Metodologi Penelitian Pendidikan*, menjelaskan bahwa penelitian pustaka (*library research*) dilakukan dengan memperhatikan setidaknya empat instrumen, yaitu: (a) menemukan suatu masalah untuk diteliti; (b) mencari informasi yang relevan dengan masalah yang akan diteliti; (c) mengkaji beberapa teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti; (d) membuat uraian teoritik yang berkenaan dengan faktor, indikator dan variabel.⁵⁷ Memperhatikan hal tersebut, disusunlah instrumen penelitian sebagaimana yang dimaksud dalam model *library research* tersebut yang diadaptasi sedemikian rupa sehingga terbentuk instrumen sebagai berikut:

⁵⁶ Ibid, hlm. 201

⁵⁷ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 78-80.

Tabel 1.4: Instrumen Penelitian

					
Bidang	Teori (Subyek)		Data (Obyek)	Analisa	Kisi-Kisi
Pembangunan	Indikator Etik Pembangunan Manusia	1. <i>Equety</i> 2. <i>Diversity</i> 3. <i>Freedom</i> 4. <i>Functioning</i> 5. <i>Capability</i>	Kontent Perda Syari'ah	➤ Analisa Data Sekunder ➤ Grounded Research ➤ Deskripsi Murni dan Komparatif ➤ Analisis Isi dan Jaringan Dengan model pembacaan: Interpretasi paradigmatis-konstruktivis dan kritis terhadap lembaga dan aktor	Analisa Koherensi 1. Koherensi definisi 2. Koherensi isi dan klasifikasi
	Indikator Praktis Pembangunan Manusia (UNDP)	<i>Human Development Index (HDI)</i> 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. NDP/GDP	Kontent Perda Syari'ah		
Agama	Konsepsi Ideologis-Normatif (Teoretik) Perda Syari'ah	Literasi diskursus Perda Syari'ah	Konteks dan Kontent Perda Syari'ah		Analisa Literasi
Kebijakan	Analisa Kebijakan Publik	1. Bingkai (Perda Syari'ah) 2. Semiotik (Terma-Terma Dalam Perda Syari'ah) 3. Kecenderungan Politik a. Aktor b. Institusi	Kontent dan Konteks		➤ Analisa Konteks 1. Konteks Historis 2. Konteks Ideologis 3. Konteks Yuridis 4. Konteks Politik 5. <i>Framing modelling</i> Kebijakan Perda Syari'ah ➤ Analisa Kontent 1. Analisa Bingkai 2. Analisa Semiotik
Validasi & Releabilitas	Triangulasi data dan teori				Relasi konteks dan kontent

3. Objek dan Subyek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah ada dua, yaitu: obyek formil dan obyek materil. Obyek formilnya berupa Perda *Syarî'ah*, sedangkan obyek materilnya adalah dimensi Pembangunan Manusia dalam Perda *Syarî'ah*.

Adapun subyek dari peneilitan ini adalah Analisa Kebijakan Publik dan Konsep Pembangunan Manusia. Analisa Kebijakan Publik ditujukan untuk membedah tentang konten dan konteks Perda *Syarî'ah*, sedangkan Konsep Pemabangunan Manusia ditujukan untuk memberdah konten Perda *Syarî'ah*.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah Penelusuran Dokumen (*documentary research*)⁵⁸ terhadap Perda *Syarî'ah* yang mencakup konteks, konten, dan teori-teori dari Pembangunan Manusia dan Penelitian Kebijakan. Data yang dimaksud bersumber dari *paper* (dokument resmi negara dan literasi bebas), data-data tentang lokasi dan waktu (*locus* dan *tempus*), tokoh dan aktor kebijakan. Data yang diambil mempertimbangkan faktor akuntabilitas, validitas, dan reliabilitas, yang diuji lewat triangulasi data yang berasal dari berbagai sumber.

⁵⁸ Ibid.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang akan diterapkan ada dua, yaitu (1) model yang diperkenalkan David Adapter tentang Analisa Kelembagaan dan Aktor,⁵⁹ dan; (2) Model yang diperkenalkan Guba sebagai Model Interpretasi Paradigmatik-Konstruktivis & Kritis yang dikembangkan dari model Saran-Taksos⁶⁰. Teknik yang pertama digunakan untuk membaca data konteks, sedangkan teknik yang kedua digunakan untuk membaca konten Perda *Syarî'ah*. Kedua model pembacaan di atas akan menjadi model pembacaan terhadap data-data yang didapat berupa: (a) data skunder; (b) data grounded research; (c) deskripsi murni dan komparatif; (d) analisis isi dan jaringan.

Analisa Kelembagaan dan Aktor, adalah analisa terhadap tokoh-tokoh yang terlibat dalam kebijakan Perda *Syarî'ah* baik berupa latar belakang para aktor, peran, dan kedudukan mereka dalam kebijakan yang dimaksud.

Sedangkan analisa kelembagaan adalah analisa terhadap struktur insitusi

⁵⁹ Pendekatan kelembagaan dan aktor menfokuskan diri pada lembaga-lembaga kebijakan serta aktor-aktor yang berpartisipasi di dalamnya. Analisa Kelembagaan, adalah analisa terhadap struktur, sistem, dan aturan dalam sebuah institusi. Lihat Riant Nugroho, *Public Policy*, ... hlm. 225

⁶⁰ Model Paradigmatik-Konstruktivis adalah model penelitian sosial yang mengacu pada asumsi bahwa kebenaran diperoleh dengan cara merekonstruksi paradigma yang ada, baik itu berupa kelompok atau individu. Realitas merupakan konstruksi sosial. Kebenaran bersifat relatif sesuai konteks yang ada. Sedangkan Model Kritis adalah, model penelitian yang mengutamakan pembacaan kontekstual, komparasi, dengan sumsi bahwa realitas yang ada adalah realitas semu yang terbentuk oleh sejarah. Pada model ini, peneliti memberi penilaian kritis lewat komparasi-komparasi terhadap sebuah kebijakan. Baca: Egon G. Guba, *Menuju Metodologi Inkuiri Naturalistik dalam Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta, Djambatan, 1987) Hlm. 45. Baca juga Riant Nugroho, *Public Policy*, ... hlm, 215.

baik berupa aturan (norma/hukum/regulasi) ataupun jaringan dalam institusi yang berperan dalam kebijakan Perda *Syarî'ah*.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi sistematis dan terarah, maka penulis menyusunnya dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang penulisan; fakta dan teori tentang Perda *Syarî'ah* dan konsep Pemabangunan Manusia global.
2. Bab II berisi tentang konten dan klasifikasi dari Perda *Syarî'ah* yang dimaksud, serta data-data faktual tentang neraca pembangunan di berbagai daerah yang menerapkan Perda *Syarî'ah*.
3. Bab III berisi tentang deskripsi konteks Perda *Syarî'ah*, pembacaan terhadap agenda setting, yang akan menjelaskan bingkai dan kecenderungan historis, politis, idiologis, dan konteks yuridis dari keberadaan Perda tersebut.
4. Bab IV berisi tentang teori dan analisa terhadap data yang ditemukan di Bab II dan III menggunakan perangkat pembedah berupa Teori Pembangunan Manusia dan Analisa Kebijakan Publik.
5. Bab V Kesimpulan.

BAB V

PENUTUP

Peneletian di atas secara garis besar menghasilkan kesimpulan sebagai berikut, yaitu:

A. Logika Sosial (*Historical Setting*) Kelahiran Perda Syari'ah

Secara historis dapat disimpulkan bahwa kelahiran Perda Syari'ah menggambarkan “ketegangan” antar kekuatan-kekuatan politik dan ideologis publik Indonesia. Hal itu tercermin dari perdebatan serius di ruang-ruang publik dan kekuasaan akan motif dan dampak adanya Perda Syari'ah. Di satu sisi, ia merupakan aspirasi mayoritas di daerah-daerah tertentu, namun di sisi lain, kontent Perda Syari'ah menggambarkan kontradiksi antara mayoritas yang mengayomi atau mayoritas yang menindas. Walhasil, para politisi kerap memanfaatkan ini untuk kampanye-kampanye pragmatis dalam Pemilu-Pemilu legislatif dan kepala daerah. Tidak hanya itu, ia (Perda Syari'ah) juga menjadi isu yang khas (*branding*) yang diusung oleh kelompok-kelompok ideologis tertentu. Artinya, *brand syari'ah*, merupakan *brand* dengan definisi kelompok pada saat yang sama.

B. Ketercapaian

Tiga daerah (Kota Bogor dengan Perda Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliah; Bulukumba Perda di daerah Bulukumba, Sulawesi Selatan dengan Perda Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Zakat; dan Tasikmalaya dengan Perda Nomor 4 Tahun 2007 Tentang

Pencegahan dan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus [HIV]/Acquired Immunodeficiency Syndrome [AIDS]) yang menjadi sampel evaluasi terhadap penerapan konsep Amartya Sen dan Jenkins dalam Perda Syari'ah memperlihatkan ketercapaian IPM yang rendah. Laporan implementasi dari Perda tersebut memperlihatkan ketercapaian antara 40% hingga 75% dengan nilai IPM yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Salah satu kendala yang paling menonjol adalah ketidaktersediaan anggaran yang mencukupi untuk program dan beban kerja penerapan Perda yang dimaksud. Ketidaktersediaan dana yang mencukupi tersebut sejatinya gambaran yang agak membingungkan dan menimbulkan pertanyaan besar, apakah Perda tersebut sejatinya bagian dari proses pemberdayaan yang dianggap penting oleh daerah yang bersangkutan, atau bagian dari kampanye politik? Mengingat, kampanye-kampanye Perda Syari'ah selalu bertolak dan berakhir dari dan ke penguatan identitas keislaman.

C. Kritik Teorisasi

Secara teori, Jenkins berpendapat bahwa kebijakan publik adalah untuk kesejahteraan publik. Perda Syari'ah (dengan tiga sampel di atas) belum menggambarkan sepenuhnya apa yang dimaksud Jenkins. Karena didapati begitu banyak data yang menyebutkan bahwa proses pembuatan Perda kurang memenuhi unsur administratif sesuai ketetapan undang-undang (misalnya dalam hal dialog publik; tidak adanya NA, dan banyak Perda yang berbentuk Perkada tanpa alasan diskresi yang kuat). Perda-Perda yang dimaksud juga banyak yang tidak berkenaan langsung dengan kesejahteraan,

namun lebih pada penguatan identitas (seperti persoalan jilbab, khalwat, dan penegakan syari'ah). Artinya, dalam konteks ini, rupanya sebuah kebijakan tidak hanya ditujukan untuk pensejahteraan seperti yang di sebutkan Jenkins, namun bisa mempunyai agenda di luar tersebut karena kehendak publik (*public based*).

Dari kacamata Amartya Sen, kebijakan pembangunan selalu diasumsikan sebagai upaya pemberdayaan lewat program-program yang membantu masyarakat terbebas dari belenggu ketidakberdayaan dan membuka akses yang sama luas terhadap *resources*. Kebijakan Perda Syari'ah tidak sepenuhnya menggambarkan hal tersebut. Kebijakan Perda Syari'ah sepertinya mempunyai pengertian lebih dari itu, yaitu bahwa penguatan identitas merupakan bagian dari motif dan arah pembangunan. Hal tersebut menggambarkan “ketegangan serius” antara visi kebijakan domestik dan kebijakan global.

D. Rekomendasi

1. Dari penelitian ini, penulis berpendapat bahwa penting kiranya di tambahkan materi khusus terkait Studi Impelementasi Perda Syari'ah di konsentrasi IPKI (Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik) IIS (Interdisciplinary Islamic Studies) Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
2. Perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait implementasi Perda Syari'ah dalam konteks kebijakan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizy, A. Qodri. *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Cet. I, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Abdullah, Masykuri dkk., *Formalisasi Syari'at Islam di Indonesia*, Jakarta, Renaissance, 2005.
- Abdulla, U. A., *Islam Liberal dan Fundamental: Sebuah Pertarungan Wacana*, Yogyakarta, elSAQ Press, 2003, hlm. 74.
- Ahnaf, Mohammad Iqbal, Tiga Jalan Politik Islam Indonesia: Reformasi, Refolusi, dan Revolusi, *Wawasan: Jurnal Agama dan Sosial Budaya*, vol 1, no. 2, 2016.
- Al Barbasi, Ma'mun Murad, "Pudarnya Politik Aliran", dalam *Poelitik*, Jurnal Politik, vol 5, no 1 2009.
- Al Kamil, Sukron. *Syariah Islam Dan HAM: Dampak Perda Syariah Terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan, Dan Non-Muslim*. Edited by Sukron Kamil & Chaider S Bamualim. Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture & Konrad Adenauer Stiftung, 2007.
- Alwi, *Legislasi dan Mashlahah di Indonesia: Studi Impelementasi Perda Bernuansa Syari'ah di Indonesia*, Disertasi, IAIN Surabaya 2001.

Aritonang, Diro, *Runtuhnya Rezim Daripada Soeharto*, Jakarta, Pustaka Hidayah, 1999.

Ase, Fadli, *Mengkaji Ulang Eksistensi Perda Bermuatan Syari'ah: Sebuah Pendekatan Yuridis Normatif*, (tt., tp., tt.).

A.K. Pringgodigdo, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Jakarta, Dian Rakyat, 1994.

Aminuddin, Faisal, dan Romel Masykuri, "Geneologi dan Transformasi Ideologi Partai Berbasis Islam di Indonesia Pasca Orde Baru", dalam *Islamica*, vol. 10, No. 1 (tt.), ResearchGate, 2015.

Ansor, Muhammad, "Asas Islam dan Artikulasi Partai Islam: Studi Perbandingan Terhadap PPP, PBB, dan PKS (1999-2004)", *Tesis Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah*, Jakarta, 2004.

Azra, Azyamardi, *Pergolakan Politik Islam*, Jakarta, Paramadina, 1996.

Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII. Akar Pembaruan Islam Indonesia: Edisi Perennial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Batt, Simon, Islam, "The State, and The Consitutional Court In Indonesia", dalam *Pacific Rim Law & Policy Journal Association*, vol. XIX no. 2, 2010.

Bell, Daniel, *The Cultural Contradictions of Capitalism*, New York, Basic Books, 1976.

Benda-Beckmann, Franz von & Keebet von Benda-Beckmann. "Identity in Dispute: Law, Religion, and Identity in Minangkabau," *Asian Ethnicity* 13, no. 4 Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 2012.

Buehler, Michael dan Elizabeth Pissani, *Why do Politician Indoensian Promote Shari'a Laws? An Analitic Framework for Muslim Majority Demoraties*, E. Pisani and M. Buehler (eds.), (tt.), TWQ Roudledge, 2016.

Bush, Robin. "Regional 'Sharia' Regulations in Indonesia: Anomaly or Symptom?" In *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*, edited by Greg Fealy & Sally White, 174–191. Singapore: Institute of Southeast Asia Studies, 2008.

Bustaman, Ahmad Kamaruzzaman, "The Application of Islamic Law in Indonesia: the Case Study of Aceh", dalam *Journal of Indonesian Islam*, vil XIX, no. 2, (tt.. Tp.), 2010.

Buehler, Michael, dan Elizabeth Pissani, *Why do Politician Indoensian Promote Shari'a Laws? An Analitic Framework for Muslim Majority Demoraties*, E. Pisani and M. Buehler (eds.), (tt.), TWQ Roudledge, 2016.

Cevin P., Clement. *From Right to Left in Development Theory* (edisi terjemahannya: *Teori Pembangunan dari Kiri ke Kanan*), Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1997.

Chatterjee, Shoutir Kishore, "Measurement of Human Development: an Alternative Approach," *Journal of Human Development*, (tt. tp.), 2005.

Clements, Kevin P., *From Right to Left in Development Theory* (terj. *Teori Pembangunan dari Kiri ke Kanan*), Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1997.

Des, Gasper, *The Ethics of Development*, Edinburg, Edinburgh University Press Ltd., 1994.

Effendy, Muhajir. *Masyarakat Equilibrium*, Yogyakarta: Bentang Budaya, 2002.

Fahrudin, *Dinamika Pemikiran Politik Umat Islam Indonesia Pada Masa Orde Baru dan Orde Reformasi*, (tt., tp., tt.).

Fakih, Mansoer, *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Yogyakarta, Insist-Press, (tt.).

Fanani, Ahmad Fu'ad, "Dilema Partai Politik Islam: Terpuruk Dalam Kegagalan atau Menjawab Tantangan?", *Jurnal Ma'arif*, vol 8, no. 2, 2013.

Fazlurrahman, *Islam*, dalam terjemahannya: *Islam Modernitas dan Transformasi Intelektual* (Penrj. Ahsin Muhammad), Bandung, Penerbit Pustaka, 1985.

Fromm, Erich. *The Anatomy of Human Destructiveness* dalam edisi terjemahannya: *Akar Kekerasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Goble, Frank G. *The Third Force, The Psychology of Abraham Maslow*, New York, Washington: Square Press, 1971; dan edisi terjemahannya: *Madzhab Ketiga, Psikologi Humanistik Abraham Maslow*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1987.

Gormely, Patrick J., "The Human Development Index in 1994: Impact of Income on Country Rank." *Journal of Economic and Social Measurement*, vol. 21. (tt., tp.), 1995.

Gufron, M. *Politik Islam di Yogyakarta*, (Yogyakarta: Diva Press, 2009).

Halim, Abdul, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia, dari Otoriter Konservatif Menuju Konfigurasi Demokratis-Responsif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2000.

Hefner, Robert W. "Indonesia: Syari'at Politics and Democratic Transition," *Syari'at Politics: Islamic Law and Society in the Modern World*, ed. Robert W Hefner, Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 2011.

Hermawan, Rudi. *Historitas Perda Syari'ah, Tinjauan Korelasional antara Perda Syari'ah dan Gerakan Islam di Indonesia*, (Thesis), Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 2004.

Hasyim, Luthfi. *Pembangunan Manusia dalam Teori Kapabilitas Amartya Sen*, (Thesis), Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM, 2006.

Herbert, McClosky. & Zaller, Jhon. *The American Ethos: Public Attitudes toward Capitalism and Democracy*, U.S.A.: Massachusetts, 1984; dan edisi terjemahannya: *Etos Amerika, Sikap Masyarakat terhadap Kapitalisme dan Demokrasi*, Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1988.

Hadiz, Vedi. *Political Islam in Post-Authoritarian Indonesia*, Center for Research on Inequality, Human Security and Ethnicity, University of Oxford Oxford, 2010.

Hadiz, Vedi, *Islamic Populism In Indonesia and The Meadle East*, (Cambridge, Cambridge University, 2016), hlm. 45.

Huntington, Samuel P., Political Development and Political Decay,” dalam Welch, ed., *Political Modernization*, New York, Buffalo University, 1965.

Hamdi, Ahmad Zainul. “Syariat Islam dan Pragmatisme Politik: Studi Kasus Penerapan Syariat Islam di Pamekasan Madura,” dalam *Agama dan Kontestasi Ruang Publik*. “ed.” Badrus Samsul Fata, Jakarta: The Wahid Institute, 2011.

Haq, Mahbub Ul, *Reflections on Human Development*, Delhi, Oxford University Press, 1999.

Heilbroner, Robert, *Vision of The Future*, London, Oxford, 1995.

Huda, Ni'matul. *Ilmu Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Husein, Nadirsyah, *Shari'a and Constitutional Reform In Indonesia*, Singapore, ISEAS, 2007.

Hettne, Bjorn, *Teori Pembangunan dan Tiga Dunia*, Jakarta, Gramedia, 2001.

Iqbal, Muhamamd, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, New Delhi, Kitab Bavan 1981.

Jakti, Dorojatun Kuncoro, “Perencanaan Ekonomi Nasional Menghadapi Tantangan Globalisasi”, dalam Mohammad Asjad Anwar dan Winarno Zein, ed., *Alumni FEUI dan Tantangan Masa Depan: Beragam Pemikiran*, Jakarta, Gramedia, 1995.

Jones, Sidney, dkk., *Sisi Gelap Demokrasi: Kekerasan Masyarakat Madani Indonesia*, Jakarta, Pusat Studi Agama dan Demokrasi Paramadina, 2015.

Jones, Sidney, “Sisi Gelap Demokrasi Inddonesia: Munculnya Kelompok Masyarakat Madani Intoleran”, dalam *Nurkholis Madjid Memorial Lecture VII*, 2013.

Kaelani, Najib, “Muslimising Indonesian Youth: The Tarbiyah Moral and Cultural Movement in Contemporary Indonesia”, ed. Remy Madinier, dalam Norma Permata and Najib Kaelani, *Islam and The 2009 Indonesian Elections, Political and Cultural Issus*, Bangkok Tahiland, IRASEC, 2010.

Kettl, Donald, “Governing at the Mellenium”, dalam James L. Perry, ed., *Handbook of Public Administration*, San Francisco, Jossey Bass, 1996.

Kalanges, Kristine, “Sharia and Modernity”, dalam Peribearman and Ruut Paters (ed.), *Ashgate Research Companion to Islamic Law*, Burlington, 2014.

- Kuncoro, Mudjarat, *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*, Jakarta, Penerbit Erlangga, 2004.
- Kusuma, Arsyad Sobi, “Islam dan Politik Pemerintahan: Pemikiran Politik Muhammad Husain Haikal”, *Analisis*, vol. XIII, no. 2, (2013), hlm. 91.
- Lida, Akira, *Paradigm Theory & Policy Making: Reconfiguring the Future*, Tokyo, Tuttle, 2004.
- Manan, Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Pusat Studi Hukum Fakultas UII, 2001, hlm. 37-52.
- Manan, Bagir, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta, FH UII Press, 2013.
- Mankiw, N. Gregory. *Macroeconomic's*, New York: Worth Publishers, 2003; dan edisi terjemahannya: *Teori Makroekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2003.
- Mahmudah, Yulia. *Dampak Penerapan Perda Syari'ah Terhadap Kerukunan Umat Beragama: Studi Kasus Perda Syari'ah di NAD*, (Thesis), Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga. 2007.
- McClosky, Herbert & Jhon Zaller, *The American Ethos: Public Attitudes towards Capitalism and Democracy*, Massachusetts U.S.A., Harvard University Press, 1984.
- M. Zaki, Arah Legislasi Hukum di Indonesia dalam Perspektif Agama dan Negara, dalam *Miqat*, vol. XXXIX, No. 1, (tt., tp.), 2015.

Muhlasul Wr., Ahmad, “Dimensi Pembangunan Manusia dalam Perda Syari’ah: Studi Kebijakan Publik Terhadap Perda Syari’ah di Indonesia”, *Tesis*, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.

Nafziger, E. Wayne, *Economic Development*, New York, Cambridge University Press, 2006.

Nor, Deliar, *Gerakan Modern Islam, 1900-1942*, Jakarta, LP3ES, 1996.

Nugroho, Riant, *Public Policy*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2009.

O’Brien, Robert, *Contesting for Global Governance*, Cambridge, Cambridge University Press, 2000.

O’neil, William F., *Educational Ideologies: Contemporary Expression of Educational Philosophies*, California, Goodyear Publishing Company, 1981; dan edisi terjemahannya: *Ideologi-ideologi Pendidikan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002.

Permana, Wahyu. *Melangkah di Tengah Badai: Pokok-pokok Pikiran Jenderal TNI Wiranto*, Jakarta: Yayasan Kebangsaan Bersatu, 1999.

Person, Wayne, *Public Policy*, (tt.), Edward Elgar Publishing, 2001.

Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, t.th.

Porter, Michael E., *The Competitive Advantage of The Nation*, London, MacMillan, 1998.

Raharjo, Wasisto Jati, “Permasalahan Implementasi Perda Syariah Dalam Otonomi Daerah,” *Al-Manahij* 7, no. 2, Jakarta: 2013.

Raharjo, Wasisto Jati, “Memaknai Kelas Menengah Muslim Sebagai Agen Perubahan Sosial Politik Indonesia”, dalam *At-Tahrir*, vol, 16, no 1, (tt., tp.), 2016.

Raharjo, Wasisto Jati, “Islam Populer Sebagai Pencarian Identitas Muslim Kelas Menengah Indonesia”, *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, vol. 5 no. 1 (tt., tp.), 2015.

Raharjo, Wasisto Jati, “Tinjauan Perspektif Intelegensia Muslim Terhadap Genealogi Kelas Menengah Muslim Di Indonesia.” *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 1, 2015.

Rahmat, M. Imdadun, *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Gerakan Revitalisasi Islam ke Indonesia*, Jakarta, Penerbit Airlangga, 2005.

Rahmat, M. Imaduddin, *Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*, Yogyakarta, LkiS, 2008.

Ramulyo, Moh. Idris, *Asas-Asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 1995.

Ricklefs MC., *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Jakarta, Serambi, 2007.

- Romli, Mohamad Guntur. “Siswi-Siswi Kristen Pun Terpaksa Berjilbab; Kewajiban Busana Muslim Di Kota Padang,” *Jurnal Perempuan* 60, Jakarta: 2008.
- Sabatier, Paul. A, “Prawacana”, dalam Hans-Dieter Klingemann, Richard I. Hofferbert, dan Ian Budge, *Partai, Kebijakan, dan Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000.
- Sadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta, UI Press, 1993.
- Saputra, Ardi. *Hukum Islam Visa a Vis Konstitusi Negara Republik Indonesia*, (Thesis), Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2000.
- Sahid. “*Formalisasi Syariat Islam Dalam Konstruksi Kyai NU Struktural Jawa Timur*”. (Disertasi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009).
- Salim, Arskal & Azyumardi Azra, “The State and Shari’a In The Perspective of Indonesian Legal Politics” dalam Arskal Salim & Azyamardi Azra, *Shari’a and Politic In Modern Indonesia*, Singapore, ISEAS, 2003.
- Schultz, Theodore W. “Chapter 5.”, (1964), Seperti dikutip oleh: E. Wayne Nafziger, *Economic Development*, New York: Cambridge University Press, 2006.

Sen, Amartya. "[The Concept of Development](#)," in H. Chenery and T.N. Srinivasan (eds). *Handbook of Development Economics*. Vol 1. (tt.), Elsevier Science Publishers, 1998.

Sen, Amartya, *Development as Freedom*, Oxford, Oxford University Press, 1984.

Sen, Amarta K, *Poverty and Feminies*, Oxford, Oxford University Press, 1982.

Sen, Amartya Sen, *Resources, Values and Development*, Cambridge, Harvard University Press, 1984.

Sen, Amartya K., Ethics and Development, Day At The Inter-American Development Bank, Organized by the Inter-American Initiative on Social Capital, Ethics and Development and the Division of State and Civil Society (REI) with the Cooperation of the Government of Norway and ECLAC (Mexico) "Reanalyzing the Relationship Between Ethics and Development", (Washington DC., 2004).

Sen, Amartya, 'Public Action and the quality of Life in Developing Countries.' *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, vol. 43, no. 4, (tt., tp.), 1981.

Sen, Amartya, *Commodities and Capabilities*, Amsterdam, North Holland, 1985.

Sen, Amartya, *The Standard of Living*, Cambridge, UK, Cambridge University Press, 1987.

Sen, Amartya, *Inequality Reexamined*, New York, Russell Sage Foundation, New York, 1992.

- Shihab, M. Quraish, "Ahl Kitab", ed. Muhammad Wahyuni Nafis, *Rekonstruksi Renungan Religius Islam*, Jakarta, Paramadina, 1996.
- Suismanto. "Perda Syariat Islam Dan Problematikanya: Kasus Tasikamalaya." *Aplikasia, Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama* 8, no. 1, Jakarta: 2007.
- Santoso, Purwo, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Research Center for Politic and Government UGM, 2010.
- Suryono, Agus. *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2010.
- Suriamuhardja. Dadang Ahmad, "Tantangan Peran Pendidikan Tinggi di Masa Depan," dalam *MDG's*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.
- Suaedy, Ahmad, "Penerapan Syari'at Islam dan Tantangan Demokrasi di Indonesia", dalam *Agama dan kontestasi Ruang Publik: Islamisme, Konflik dan Demokrasi*, Jakarta, The Wahid Institute, 2011.
- Srinivasan, T.N., "Human Development: A New Paradigm or Reinvention of the Wheel?" *American Economic Review*, vol 84, no. 2 (tt., tp.), 1994.
- Shubron, Sudarno, "Islam dan Demokrasi: Impelementasi Dalam Gerakan Islam Indonesia", *Akademika: Jurnal Kebudayaan*, vol 4, no. 1, 2009.
- Streeten, Paul, "Human Development: Means and Ends." *American Economic Review*, vol 84, no. 2 (tt., tp.), 1994.

Syafi'ie, Inu Kencana. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014.

Syawaluddin S., "Refleksi Atas Pemikiran Amartya Kumar Sen, Tentang Ketimpangan dan Kemiskinan", *Albuhuts*, vol. 11, no. 1, (tt., tp.), 2015.

Thut, I.N. & Adams, Don, *Educational Pattern in Contemporary Societies*, New York, McGraw-Hill Book Company, 1984; dan edisi terjemahannya: *Pola-pola Pendidikan Dalam Masyarakat Kontemporer*, Yogyakarta, Pelajar Pustaka, 2005.

Thurow, Lester C., *The Future of Capitalisme*, London, Nicholas Brealey, 1996.

Turner, Bryan S., "Muslim Societies and the Challenge of Secularization: An Interdisciplinary Approach", *Asia Research Institute*, Gabriele Marranci (ed.), Singapore, Springer, 2010.

Todaro, Michael P. & Stephen C. Smith. *Economic Development*, Edisi ke 11, New York: Addison Wesley, 2010.

UU Republik Indonesia No 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No.172).

Wahid, Marzuki, "Anomali Agama dan Politik: Fenomena Regulasi Bernuansa Islam", *The Wahid Institute*, Jakarta, 2011.

Weber, Max, *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism and Other Writings*, New York, Penguin, 2002.

Weber, Max, "Class Status Power", *From Max Weber Essays in Sociology*, Gerth and C. Wright Mills (eds), New York, Oxford University Press, 1946.

Wilson, Bryan, 'Secularization: The inherited model', in P. Hammond (ed), *The Sacred in a Secular Age: Toward Revision in the Scientific Study of Religion*, Berkeley: University of California Press, 1985.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Ahmad Muhlasul Wr.

Tempat/tgl.Lahir : Sumenep, 15 September 1982

Alamat asal : RT 04/05 Kanggotan Lor, Pleret Bantul Yogyakarta

Nama Ayah : Moh. Ihsan Nawawi

Nama Ibu : Homaidah

Nomor HP : (+62) 87719191967

Nomor Paspor : -

Alamat Email : alfaqirilarahmatirabbih@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal:

- a. MI Mathlabul Ulum Pragaan Sumenep 1997
- b. MTs. Mathlabul Ulum Pragaan Sumenep 1998
- c. Pond. Pest. Al Amien Prenduan Sumenep 2000
- d. S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010

e. S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017

2. Pendidikan Non-Formal:

a. Pond. Pest. Mathalabul Ulum Pragaan Sumenep 1991-1999

b. Pond. Pest Al Amien Prenduan 1998-2002

c. Pond. Pest. Mamba'ul Huda Pare Kediri 2002

d. Mahesa Institute Pare Kediri 2002

e. Dll.

C. Karya Tulis

1. Ahmad Muhlasul Wr., *Sembilan Hari Mengaji Sunyi*, Yogyakarta, Al Fath Press, 2008.
2. Ahmad Muhlasul Wr., *Mengenal Cinta*, Yogyakarta, Gramedia, 2015.
3. Berbagai cerpen, sajak, dan essai di berbagai majalah dan surat kabar.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA